

**TESIS**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG**

**oleh:**

**Petrolika**

**NIM. 2020123008**



**Dibawah Bimbingan:**

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.  
Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

## PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG

Oleh : Petrolika  
ABSTRAK

Tanah merupakan barang daerah yang tak lain adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Pelaksanaan pendaftaran barang daerah yang berupa tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Wali Kota Padang No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) Bagaimana pengaturan pendaftaran Barang Milik Daerah berupa tanah pemerintah pada kantor Pertanahan (Kantah) ? 2) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran barang milik pemerintah berupa tanah pada kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang? 3) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah pemerintah pada kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang ? Penelitian ini bersifat deskriptif empiris yaitu penelitian memberikan gambaran perlindungan hukum terhadap notaris sehubungan dengan pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis empiris Hasil penelitian Pelaksanaan pendaftaran barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kota Padang masih belum 100% dilakukan, Pelaksanaan pendaftaran barang milik daerah atau tanah milik Pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu mengamankan barang milik daerah berupa tanah dengan membuat sertifikat sebagai alas hak nya. Faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan pendaftaran barang milik daerah berupa tanah yaitu masalah Administrasi, Kurangnya Koordinasi, Sumber daya manusia. Dengan adanya Administrasi yang baik akan dapat memperoleh data/informasi secara memadai. Dan Sumber Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor internal yang menghambat pelaksanaan pendaftaran barang milik daerah berupa tanah di daerah karena dalam pendaftaran barang milik daerah berupa tanah harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti, harus diperhatikan pula letak dan keadaan fisik serta penggunaan tanah yang akan didaftar.

Kata kunci : Pendaftaran Barang Milik Daerah, Tanah, Pemerintah Kota Padang .

**IMPLEMENTATION OF LAND OWNED REGISTRATION  
PADANG CITY REGIONAL GOVERNMENT**

By: *Petrolika*  
**ABSTRACT**

*Land is a regional item which is nothing but an important resource for the regional government itself as the main support for regional original income. The implementation of registration of regional property in the form of land is based on Government Regulation Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property and Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007 concerning Technical Guidelines for Implementing Regional Property Management, and Padang Mayor Regulation No. 10 of 2017 concerning Management of Regional Property. This research aims to find out about: 1) How are the registration arrangements for Regional Property in the form of government land at the Land Office (Kantah)? 2) How is the registration of government property in the form of land carried out at the Padang City Land Office (Kantah)? 3) What are the legal consequences if regional property in the form of government land is not registered at the Padang City Land Office (Kantah)? This research is descriptive empirical, namely the research provides an overview of legal protection for notaries in connection with inspections by the Padang City Land Office. The approach used in this research is a normative juridical approach, namely research that emphasizes legal aspects, by studying primary legal and secondary legal materials which will later be used as a guide in understanding and analyzing the issues discussed, while as support for the main approach, an empirical juridical approach is used. Research results. The implementation of registration of regional property in the form of land belonging to the Padang City Government is still not 100% complete. , The implementation of registration of regional property or land belonging to the Regional Government has been carried out in accordance with Padang Mayor Regulation No. 10 of 2017 concerning Management of Regional Property, namely securing regional property in the form of land by making a certificate as the basis for the rights. Factors that hinder the implementation of registration of regional property in the form of land are administrative problems, lack of coordination, human resources. With good administration, you will be able to obtain adequate data/information. And human resources (HR) are one of the internal factors that hinder the implementation of registration of regional property in the form of land in the region because the registration of regional property in the form of land must be carried out carefully and precisely, the location and physical condition and use of the land must also be taken into account. will be registered.*

*Keywords: Registration of Regional Property, Land, Padang City Government*